

# SKRIPSI

## STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL ANTAR MASYARAKAT (STUDI KASUS) PADA DESA PELANGAN KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT

Strategy of the Village Government in Settling Inter-Community Social  
Conflict (Case Study) in Pelangan Village, Sekotong District



JURUSAN URUSAN PUBLIK  
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2019

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah di setujui untuk di ujikan dan di ajukan ke panitia ujian  
Skripsi Program Studi Administrasi Publik pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juni 2019

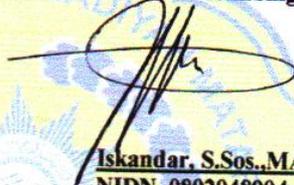
Mengetahui :

Dosen Pembimbing I



Mardiah, S.Sos., M.Si.  
NIDN. 0804117201

Dosen Pembimbing II



Iskandar, S.Sos., MA.  
NIDN. 0802048904

Mengetahui,  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua



Rahmatulhidayat, S.AP., M.AP.  
NIDN. 0822048901

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Pelangan Kecamatan Sekotang Kabupaten Lombok Barat)**

Oleh :

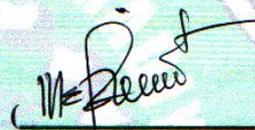
**ARIAH  
21511A0082**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada Jurusan Publik Telah disetujui oleh tim penguji pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.

Mataram, 12 April 2019

**Tim Penguji**

1. **Mardiah, S.Sos.M.Si.**  
NIDN. 0804117201



2. **Iskandar, S.Sos.,MA.**  
NIDN. 0802048904



3. **Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP**  
NIDN. 0822048901



**Mengetahui**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan**



**Sis. H. M. Junaidi, M.M**  
NIDN. 0807066201

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIAH

Nim : 21511A0082

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik (serjana, magister, dan/dokter baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lainnya).
2. Karya Tulis Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di publikasikan orang lain, keecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam hal ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram 28 Februari 2019



Nim. 21511A0082

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)”**.

Penulisan Karya Ilmiah ini di maksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar strata 1 administrasi public pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Banyak pihak yang telah membantu dan memeberikan dukungan dalam penyusunan proposal skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Mataram
2. Drs. H.M. Junaidi, MM Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah
3. Ibu Mardiah, S.Sos.,M.Si Selaku Wakil Dekan 1 Fisip sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan Karya Ilmiah ini
4. Bapak Iskandar, S.Sos.,MA Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang senantiasa telah banyak membimbing dan mendamping dalam penulisan Karya Ilmiah ini
5. Kedua Orang Tua ku tersayang Bapak Imran dan Ibunda Jasiah serta saudara-saudari ku tercinta Jariah, Ikhlas Shalat, Riski Aditya, Ayuni, Lalu Wahyu Ilham Dani, Wahyu Ramdana, Muhammad Zihnul Amri,

Ahmad Baihaqi, Oktriliani Glora, Sri Endank, Devi Febrian Aulia yang selalu mendukung dan mendoakan penulis

6. Para Dosen yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu per satu, teman-teman seperjuangan dan pihak luar yang tidak tangguh-tangguhnya membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan Proposal ini.

Semoga semua bantuan yang telah di berikan mendapat imbalan berkah dari Allah SWT, karena tiada daya kami untuk membalas segala kebaikan yang telah di berikan.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan untuk turut menyempurnakan tulisan ini.

**Mataram, 24 Oktober 2018**

**Penulis,**

**ARIAH**

**NIM.21511A0082**

## **ABSTRAK**

### **Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)**

**Ariah<sup>1</sup>, Mardiyah<sup>2</sup>, S.Sos.,M.Sc, Iskandar<sup>3</sup>S.Sos., MA**

<sup>1</sup>**Mahasiswa**

<sup>2</sup>**Pembimbing Utama**

<sup>3</sup>**Pembimbing Kedua**

Penelitian ini membahas Strategi Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial Antar Masyarakat di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penyebab konflik antara masyarakat dan strategi Pemerintah Desa dalam menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat di Desa Pelangan Kecamatan, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data, pertama, yaitu primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kedua, sekunder, yaitu berupa review buku, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan judul penulis. Dalam kompilasi uraian ada teori, yang merupakan garis dari teori konflik dan kebijakan publik.

Hasil dari penelitian ini menggambarkan dua hal pokok: 1) penyebab yaitu, perilaku negative dari supporter club sepak bola yang melakukan anarkisme dan kekerasan, sehingga terjadi bentrok antar supporter. Masyarakat Desa Pelangan memanas ketika para pendukung sepak bola bentrok dan bertindak anarkis dengan melakukan tindak kekerasan terhadap sesama pendukung di luar lapangan, hal ini yang menyebabkan kerusuhan dan menjadi konflik sosial antar masyarakat di Desa Pelangan. 2) Strategi Pemerintah Desa sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yaitu sebagai orang pertama yang mengambil kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Pelangan telah memiliki strategi dalam penyelesaian konflik sosial antar masyarakat. Meskipun penanganan konflik dari pemerintah desa tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini Pemerintah Desa sudah bersikap netral tanpa membedakan satu sama lainnya dalam melakukan pertemuan dari pihak-pihak yang berkonflik.

Kata kunci: Resolusi Konflik

## **ABSTRACT**

### ***Strategy of the Village Government in Inter-Community Social Conflict Resolution***

***(Case Study in Pelangan Village, Sekotong District, West Lombok Regency)***

***Ariah<sup>1</sup>, Mardiyah<sup>2</sup>, S.Sos.,M.Si, Iskandar<sup>3</sup>S.Sos., MA***

***<sup>1</sup>College Student***

***<sup>2</sup>Main Guidance***

***<sup>3</sup>Escort Guide***

*This study discusses the Strategy of the Village Government in Inter-Community Social Conflict Resolution in Pelangan Village, Sekotong District, West Lombok Regency. This study aims to describe the causes of conflict between the community and the strategy of the Village Government in resolving social conflicts between communities in Pelangan District, Sekotong, West Lombok Regency.*

*This study uses descriptive qualitative research methods using data collection methods, first, namely primary through observation, interviews, documentation, second, secondary, namely in the form of reviews of books, journals, and internet sites related to the author's title. In the compilation of descriptions there are theories, which are lines of conflict theory and public policy.*

*The results of this study illustrate two main points: 1) the causes are, negative behavior from football club supporters who carry out anarchism and acts of violence, resulting in clashes between supporters. The Pelangan Village community heated up when football supporters clashed and acted anarchistically by committing acts of violence against fellow supporters outside the field, which caused riots and became a social conflict between communities in Pelangan Village. 2) The Strategy of the Village Government has proceeded accordingly according to their respective duties and functions, namely as the first person to take policy. In this case the Pelangan Village Government has a strategy in resolving social conflicts between communities. Although the handling of conflicts from the village government is still relatively weak, in this case the Village Government has been neutral without discriminating with each other in conducting meetings of the parties involved.*

***Keywords: Conflict Resolution***

## MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ  
رَوْحِ الْعَالَمِينَ  
عَلَيْهِمْ

Semua mahluk itu berada di dalam genggaman kekuasaan Allah dan hanya kepada-Nyalah segala urusan dikembalikan. Tak ada seseorang pun yang hidup atau mati kecuali berdasarkan kehendak dan takdirnya. Tidak ditambahkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi kecuali dengan keputusan dan takdir Allah. Pengetahuan dan penglihatan Allah menembus semua mahluknya. Tidak ada sesuatu pun yang samar dari perkara mereka bagi Allah. (Tafsir Ibnu Kasir, QS Ali 'Imran [3]: 156).

Lengkapilah hidup ini dengan mengingat Allah, maka dengan mengingat Allah Hati akan menjadi tenang

## PERSEMBAHAN

Segala pujibagi Allah SWT, yang telah memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menempuh ujian ini sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Karya tulis ini khusus kupersembahkan untuk:

- ✓ Kedua orang tuaku, Ibu (JASIAH) dan Bapak IMRAN), yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang di setiap perjalanan hidupku. Terimakasih atas doa yang selalu engkau panjatkan untuk segala kemudahan meraih cita-cita.
- ✓ Untuk Dosen-Dosenku yang terhormat, kami berterimakasih yang sebesar-besarnya atas segala kesabarannya dalam membimbing saya, sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ✓ Saudara-Saudaraku ( JARIAH, SUTIAH, IKHLSAS, RIZKI ADITYA) yang selalu menjagaku dan mengulurkan tangan di setiap aku membutuhkan.
- ✓ Kekasih saya yang selalu mendukung dan memberikanku semangat juang yang tinggi
- ✓ Sahabat-sahabatku (Wahyu Ramdana, Wahyu Ilhamdani, M. Zihnul Amri, Devi febrian aulia , Oktriliani gelaura ) dan juga teman- teman Fakultas. Fisipol angkatan 2015 yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan danManfaatPenelitian.....	6
1.3.1 TujuanPenelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1. ManfaatAkademis .....	6
2. ManfaatTeoritis .....	7
3. ManfaatPraktis.....	7
<b>BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Tinjauan Strategi .....	11

2.2.2 Tinjauan PemerintahDesa .....	16
2.2.3 TinjauanTentang Konflik .....	29
2.2.4 Tinjauan Tentang Masyarakat.....	38
2.3 Kerangka Pemikiran .....	43
<b>BAB IIIMETODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2 WaktudanLokasiPenelitian .....	46
3.3 Informan .....	46
3.4 Jenis dan sumber data .....	47
3.4.1 Jenis Data .....	47
3.4.2 Sumber Data .....	47
3.5 Teknik pengumpulan Data.....	48
3.6 Teknik Analisis Data .....	49
3.7 Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 GambaranUmumDesaPelangan.....	52
4.1.1 SejarahDesa .....	52
4.1.2 KondisiGeografis.....	54
4.1.3 StrukturOrganisasi .....	55
4.1.4 Sumber Mata Pencaharian .....	56
4.1.5 Agama.....	56
4.1.6 Fasilitas.....	56
4.1.7 UraianTugasPokokDesa .....	57

4.1.8 Jumlah KK penduduk .....	69
4.2 Penyebabterjadinyakonflikantarmasyarakat di DesaPelangan .....	70
4.3 StrategiPemerintahDesadalampenyelesaiankonfliksosialantarMasyara kat .....	74
<b>BAB VPENUTUP.....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran-Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 4.1.1 Nama-nama Kepala Desa Pelangan yang pernah menjabat.....	53
Tabel 4.1.6 Fasilitas yang ada di Desa Pelangan .....	56
Tabel 4.1.8 Jumlah KK Penduduk .....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Desa atau disebut juga pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menuntut profesionalitas dari aparat pemerintahan untuk meningkatkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyelesaian konflik sosial antar masyarakat. Dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, pemerintah desa dituntut lebih tanggap menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah warganya, pemerintah desa mampu bersifat netral, dengan mengedepankan prinsip kebenaran, tanpa harus memihak.

Setiap manusia tentu pernah mengalami konflik, baik itu berat maupun ringan. Masing-masing dari kita memiliki gaya tersendiri dalam menghadapi konflik. Pertentangan (konflik) didalam masyarakat mungkin

dapat menjadikan sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Konflik merupakan suatu kejadian yang didahului oleh suatu tahapan peristiwa dan antara satu fasedengan fase berikutnya saling berkaitan.(Owens 2005:22)

Manusia sering kali dihadapkan pada situasi konflik sosial yang memanas.Munculnya konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya dan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak faktor yang harus dikaji mengapa konflik sosial tersebut sering kali muncul pada masyarakat. Pada umumnya konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan organisasi, bahkan konflik selalu hadir dalam setiap hubungan kerjasama antar individu, kelompok maupun organisasi. Konflik selalu melibatkan orang, pihak atau kelompok orang, menyangkut masalah yang menjadi inti, mempunyai proses perkembangan, dan ada kondisi yang menjadi latar belakang sebab-sebab dan pemicunya. (Hardjana, A. M. 2013:23)

Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, Hendrick, W. (2010:19). Konflik adalah perselisihan, pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dimana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lainnya sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. (Hardjana 2013:18). Kedua pendapat terakhir menganggap bahwa pertentangan antar individu dan kelompok sebagai perilaku yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi.Dengan

demikian konflik diartikan sebagai peristiwa yang dapat merugikan bagi masyarakat.

Seperti peristiwa yang terjadi di desa pelanggan pada tahun 2016 silam. Awal mula konflik sosial yang terjadi di desa pelanggan dimulai dari pertandingan sepak bola yang tergabung antar sekecamatan. Di desa pelanggan, konflik yang terjadi antar klub sepak bola sangatlah sering terjadi, mengingat ada beberapa klub yang ada di kecamatan sekotong mengharuskan mengikuti perlombaan sepak bola di desa pelanggan. Dari beberapa klub tersebut memiliki jumlah supporter yang banyak, hal ini yang membuat munculnya konflik sosial yang terjadi di desa pelanggan. Salah satu perilaku negative supporter yang sering terjadi ialah seperti perilaku anarkis dan tindak kekerasan, sehingga tawuran terjadi antar supporter yang menjadi konflik sosial di desa Pelangan. (Hasil wawancara dengan Aparatur Desa. Senin, 26 November 2018).

Kondisi masyarakat di desa Pelangan pun semakin memanas ketika supporter bentrok dan berbuat anarkis dengan melakukan tindak kekerasan terhadap sesama supporter diluar lapangan, dan menjadi pertentangan dari berbagai pihak-pihak lain yang ikut campur untuk menghalangi kerusuhan tersebut.

Akibat dari konflik tersebut menyebabkan terganggunya keamanan dan stabilitas perekonomian warga pada masyarakat Pelangan tidak berjalan lancar. Tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat yang melakukan perdagangan dipasar Pelangan. Harapan masyarakat pada pemerintah adalah

strategi pemerintahan desa dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat di desa Pelangan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta sesuai perkembangan budaya yang telah berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun konflik sosial yang terjadi pada desa pelangan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi masalah konflik masih sering terjadi. Dalam hal ini, pemerintah desa masih belum maksimal terhadap cara penyelesaian konflik sosial yang telah terjadi di desa Pelangan. Padahal penyelesaian konflik masih bisa diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan. (Hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Pelangan. Rabu, 05 Desember 2018). Walaupun penyelesaian konflik sosial harus menggunakan prinsip kekeluargaan, jalan kekeluargaan tidak selamanya mampu menyelesaikan konflik, karena disebabkan rasa ketidakpuasan yang terkadang muncul di kalangan masyarakat, sehingga konflik sosial di Desa Pelangan terkadang bisa terjadi kembali, untuk itu masyarakat belum merasa puas terhadap hasil penyelesaian konflik secara kekeluargaan oleh aparat Desa beserta masyarakat.

Winardi (2009:64) berpendapat bahwa, metode-metode dominasi, kompromis, dan pemecahan problem secara integrative merupakan metode yang paling banyak di gunakan dalam penyelesaian konflik.

Strategi konfrontasi konstruktif merupakan strategi yang mengangkat semua persoalan kedalam debat terbuka, kedua belah pihak yang sedang konflik berhadapan-hadapan langsung untuk memecahkan masalah. Strategi

ini dirancang untuk membahas semua persoalan melalui adu argumentasi untuk mencapai consensus.( Budijanto, 2006:54).

Edelman, R. J. (2004:55) apabila konflik berkepanjangan dan sulit dicari pemecahannya, maka ada baiknya menggunakan mediator sebagai penengah. Lebih lanjut Edelman mengemukakan , tujuan digunakannya penengah adalah untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang sama-sama memuaskan. Sebagai mediator, pihak ketiga tidak dibenarkan memaksa kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihan, sebab penyelesaian yang dipaksakan tidak akan mencapai sasaran dan tidak dapat menjaga kerjasama jangka panjang. Mediator berperan mendorong terjadinya kesepakatan-kesepakatan yang mengarah pada pemecahan masalah ke arah yang menguntungkan kedua belah pihak.

Melalui hasil proses wawancara dan observasi, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap strategi pemerintah desa dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi antar masyarakat di desa pelanggan. Penelitian dan analisis tersebut dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Strategi Pemerintah Desa dalam penyelesaian konflik Sosial Antar Masyarakat(Studi Kasus Pada Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana penyebab terjadinya konflik sosial antar masyarakat di Desa Pelangan ?
2. Bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Desa Pelangan ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran strategi Pemerintahan Desa dalam penyelesaian konflik sosial antar masyarakat di Desa Pelangan.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dan beserta hambatan yang di hadapi dalam menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi refrensi bahan penelitian selanjutnya tentang penyelesaian konflik sosial antar masyarakat.

2. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan wacana sebagai suatu bahan studi perbandingan dan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah yang mengarah pada ilmu pengetahuan yang menyangkut masalah tentang strategi pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik sosial antar masyrkat.
3. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu memberikan konstribusi pemikiran sebagai suatu bahan masukan bagi pemerintah desa pelanggan kecamatan sekotong mengenai strategi pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik sosial yang sering terjadi antar masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama & Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan & persamaan
1	Debriani Ramopolii (2017)	Pengaruh Konflik Keluarga Konflik Pekerjaan dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Wanita Berperan Ganda di Rumah Sakit Prof D.R V.L Ratumbuang Manado	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel bebas ( konflik keluarga, konflik pekerjaan keluarga, dan stress kerja) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kinerja wanita berperan ganda) di karenakan F hitung > F table dan dari tingkat signifikan yang lebih kecil yaitu $0,021 < 0,05$	<p><b>Perbedaan</b></p> <p>Metode penelitian Landasan teori Lokasi penelitian</p> <p><b>Persamaan</b></p> <p>Teknik penentuan informan Sama sama membahas tentang konflik sosial</p>

			<p>sehingga dari data ini dapat di lihat bahwa kinerja wanita berperan ganda secara signifikan di pengaruhi oleh konflik keluarga, konflik pekerjaan keluarga, dan stress kerja</p>	
2	Muhammad Irwan (2017)	Pengaruh Stress Dan Konflik Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Kalla Kakao Industri di kota Makasar	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. kalla kakao industri. Hasil ini di tunjukan nilai <math>t</math> hitung lebih besar dari <math>t</math> tabel, <math>(8,794 &gt; 1,660</math> atau <math>\text{sig} &lt; \alpha(0,000 &lt; (0,05)</math>, berarti variable</p>	<p><b>Perbedaan</b></p> <p>Teknik analisis data.</p> <p>Metode penelitian.</p> <p>Lokasi penelitian.</p> <p>Jenis dan sumber data.</p> <p>Teknik pengumpulan data</p> <p>Keabsahan data</p> <p><b>Persamaan</b></p> <p>Sama-sama</p>

			<p>konflik kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Kalla kakao industri kota makasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan konflik kerja yang baik, maka kinerja yang ditampilkan pegawai juga akan semakin baik.</p>	<p>membahas konflik sosial.</p>
3	Handa Dwi Piana (2017)	<p>Pengaruh Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang</p>	<p>Hasil dari penelitian diketahui bahwa tingkat konflik kerja memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada bank syariah mandiri kantor cabang 16 Ilir Palembang yang menunjukkan bahwa</p>	<p><b>Perbedaan</b> Metode penelitian. Landasan Teori. Teknik analisis data. Sumber data. Lokasi penelitian.</p>

			<p>konflik kerja yang ada di bank syariah mandiri baik. Terbukti dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden terhadap variable konflik kerja adalah sebesar 3,77 yaitu berada pada posisi setuju bahwa adanya konflik di bank tersebut.</p>	<p><b>Persamaan</b> Sama-sama membahas tentang konflik social Penentuan informan</p>
--	--	--	---	--

**Sumber :** Debriani Ramopolii (2017); Muhammad Irwan (2017); dan Handa Dwi Piana (2017)

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Tinjauan Strategi

#### a. Pengertian strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "strategos" atau "stratagema", yang berarti "generalship" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Clawson). Ia menyatakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila istilah

strategi sering digunakan dalam keneah peperanagan. Istilah strategi digunakan pertama kali didunia militer.

William F. Glueck dan Laurance R. Jauch (2005:197) memberikan definisi strategi sebagai berikut.

Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang meyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan.Strategi berperan penting pada era global dan perdagangan bebas sekarang ini, ketika persaingan semakin hebat.Untuk meraih persaingan (*competitive advantages*), diperlukan strategi yang handal.

Akdon (2006:198) mengemukakan, “ Strategi dalam manajemen strategi organisasi, dapat di artikan sebagai kiat, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Stephanie K. Marrus (2006:98) strategi didefenisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi merupakan suatuserni dalam menyusunrencana suatuorganisasi untuk memastikantujuan yang ingin dicapai tersebutdapat tercapai dengan baik dan terlaksana denganefektif.Strategi yang diciptakandiharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan

internal ataupun eksternal organisasi. Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

b. Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang vital, dapat menembus (pavasi) dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan (Sagala, 2003:199)

Menurut Ansoff (2008:199), Manajemen strategi adalah pendekatan yang sistematis bagi tanggung jawab manajemen, mengondisikan organisasi pada posisi yang di pastikan mencapai tujuan dengan cara yang meyakinkan keberhasilan yang berkelanjutan yang membuat perusahaan menjamin atau mengamankan format yang mengejutkan.

William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch (2000: 199), Manajemen strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategi adalah suatu cara yang digunakan perencana strategi menentukan sasaran untuk membuat kesimpulan strategi.

c. Strategi penyelesaian konflik

Menurut Wijono (2004 : 42) Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Diri Individu (Intraindividual Conflict) terdiri atas tiga bagian, Yaitu:

1. Strategi Kalah-Kalah (Lose-Lose Strategy)

Beorientasi pada dua individu atau kelompok yang sama-sama kalah. Biasanya individu atau kelompok yang bertikai mengambil jalan tengah (berkompromi) atau membayar sekelompok orang yang terlibat dalam konflik atau menggunakan jasa orang atau kelompok ketiga sebagai penengah. Dalam strategi kalah-kalah, konflik bisa diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga bila perundingan mengalami jalan buntu. Maka pihak ketiga diundang untuk campur tangan oleh pihak-pihak yang berselisih atau barangkali bertindak atas kemauannya sendiri

2. Strategi Menang-Kalah (Win-Lose Strategy)

Dalam strategi saya menang anda kalah (win lose strategy), menekankan adanya salah satu pihak yang sedang konflik mengalami kekalahan tetapi yang lain memperoleh kemenangan. Beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan win-lose strategy (Wijono, 2004 : 44), dapat melalui:

- a. Penarikan diri, yaitu proses penyelesaian konflik antara dua atau lebih pihak yang kurang puas sebagai akibat dari ketergantungan tugas (task independence).
- b. Taktik-taktik penghalusan dan damai, yaitu dengan melakukan tindakan perdamaian dengan pihak lawan untuk menghindari terjadinya konfrontasi terhadap perbedaan dan kekaburan dalam batas-batas bidang kerja (jurisdictional ambiguity).
- c. Bujukan, yaitu dengan membujuk pihak lain untuk mengubah posisinya untuk mempertimbangkan informasi-informasi faktual yang relevan dengan konflik, karena adanya rintangan komunikasi (communication barriers).
- d. Taktik paksaan dan penekanan, yaitu menggunakan kekuasaan formal dengan menunjukkan kekuatan (power) melalui sikap otoriter karena dipengaruhi oleh sifat-sifat individu (individual traits).
- e. Taktik-taktik yang berorientasi pada tawar-menawar dan pertukaran persetujuan sehingga tercapai suatu kompromi yang dapat diterima oleh dua belah pihak, untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan persaingan terhadap sumber-sumber (competition for resources) secara optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### 3. Strategi Menang-Menang (Win-Win Strategy)

Penyelesaian yang dipandang manusiawi, karena menggunakan segala pengetahuan, sikap dan keterampilan menciptakan relasi komunikasi dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman dari ancaman, merasa dihargai, menciptakan suasana kondusif dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi masing-masing dalam upaya penyelesaian konflik. Jadi strategi ini menolong memecahkan masalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, bukan hanya sekedar memojokkan orang. Strategi menang-menang jarang dipergunakan dalam organisasi.

## **2.2.2 Tinjauan Pemerintah Desa**

### **a. Pengertian Pemerintah**

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Taliziduhu Ndraha (2010:86) menyatakan bahwa istilah pemerintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau yang memberi perintah. Dari pengertian tersebut, dengan demikian apa perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Perbedaan ini menurut Ndraha (2011:86) bahwa pemerintah adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan kekuasaan.

Sedangkan yang diperintah adalah orang atau sekelompok orang yang menerima perintah tersebut, yang dalam istilah pemerintahan ketatanegaraan disebut rakyat.

Apa yang telah dikemukakan Taliziduhu Ndraha tentang pemerintah dan apa yang di perintah, menurut penulis bahwa apabila kita mendengar kata pemerintah pasti pemikiran kita tertuju kepada orang atau badan yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, dimana kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya tersebut dipergunakan untuk memerintah kepada pihak lain (rakyat). Sedangkan yang diperintah adalah orang atau sekelompok orang yang harus tunduk pada perintah berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh orang atau badan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan tersebut.

Menurut W.S. Sayre (2003:87) menyatakan bahwa pemerintah adalah lembaga yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan. Sejalan dengan pandangan W.S, C.F. Strong (2007:87) menyatakan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara kedalam maupun keluar. Oleh karena itu;

1. Pemerintah harus mempunyai kekuatan tentara, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.

2. Pemerintah harus mempunyai kekuatan legislatif dalam arti membuat undang-undang.
3. Pemerintah harus mempunyai kekuatan financial, yaitu kekuasaan untuk mengumpulkan atau menarik uang pajak dari masyarakat untuk menutupi pembiayaan dalam pemerintahan negara yang melaksanakan hukum untuk dan atas nama Negara.

Kata pemerintah dapat dilihat dari arti sempit dan arti luas. Pemerintah dalam arti sempit yaitu: sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga atau organ Negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks. Organ itu adalah Eksekutif, Yudikatif dan Auditif. Pemerintah dalam arti sempit, hanya merupakan aktivitas badan-badan eksekutif saja, yang dipimpin oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Pemerintah dalam arti luas merupakan seluruh aktivitas pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh aparatur Negara yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh presiden selaku kepala Negara. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh aparatur negara (termasuk lembaga negara seperti: MPR, DPR, DPD, MA, MK dan BPK) dan aparatur pemerintah daerah, selanjutnya dalam bahasan buku ini disebut pemerintah Negara.

Bertolak dari uraian diatas, jelaslah yang dikemukakan oleh Osborne dan Plastrik (2005:88) bahwa pemerintah merupakan lembaga yang besar , kompleks, dan ruwet. Lembaga tersebut mempekerjakan jutaan orang dan membelanjakan triliunan dollar setiap tahun. Organisasinya terdiri dari banyak sekali lapisan dengan ribuan yurisdiksi politik dan public yang saling tumpang tindih. Pemerintah menampung para politikus, pegawai negeri, dan warga Negara yang saling bersaing, berkonspirasi, dan berkolaborasi.

b. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini tercermin dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004.

Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa atau yang disebut lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan

masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

### c. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya Otonomi Desa, Pemerintahan Desa diartikan sebagai : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari system penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005. Pasal 55. Peraturan Desa yaitu produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran (Hamzah Halim, 2009:12) antara lain :

1. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-

undangannya sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum ini juga lazim disebut sebagai dasar/alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum (2006 :45).

2. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.
3. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.
4. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat (acceptable), populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-

banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (Pasal 12 ayat 5 ).
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3).
3. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (Pasal 64 ayat 2).
4. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (Pasal 76).
5. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa (Pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD.
6. Peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (Pasal 82 ayat 2).
7. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89 ayat 2)

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut di atas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

1. Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.
2. Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak Pilih dalam pemilihan kepala desa.
3. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
4. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
5. Peraturan desa tentang pungutan desa.

Selain hal di atas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 57 PP No 72 Tahun 2005) dan peraturan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 58 PP No 72 Tahun 2005). Adapun rancangan peraturan desa tentang APBD Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi guna untuk

melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa (Pasal 59 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005).

d. Proses Legislasi Peraturan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Secara umum, proses penetapan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni:

a) Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam penetapan peraturan desa diprakarsai oleh kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD, namun keduanya mempunyai hak untuk mengajukan usulan peraturan desa. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa.

Usulan peraturan desa jug dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya peraturan desa setelah itu dibuat rancangan peraturan desa.

b) Tahap Sosio-Politis(Pembahasan)

Rancanganperaturandesayang telah diterima olehpemerintahdesa,selanjutnyadiadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD,kepaladesa serta perangkatdesa.Fungsiperangkatdesatersebutdimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima.Dalam rapatpembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakangdan tujuan dibuatnyaperaturandes.Selanjutnyarapat tersebut diadakananya jawabberkaitan dengan rancangan peraturan desa.Pada waktu rapatpembahasan, permasalahan yang ada dalamrancanganperaturandesadibahas satu persatu, dibacakan olehketua BPD, dan yang menetapkanperaturandes adalahKepaladesa.RancanganPeraturandesayang diajukan bermula dari satu pendapat atausatu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahasbertemu dengankepaladesa,sekretarisdesa danperangkatdesalainnya sehingga menghasilkakesepakatan bersama, makaperaturandesayang diajukan selalumengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi danmateriperaturandes, sehinggaperaturandesayang dihasilkan dapatmemenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum.Setelah diadakan pembahasan

yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah peraturan desa. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

c) Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Pasal 12 ayat 1 & 2). Setelah ditetapkan menjadi peraturan desa, kepala desa memerintahkan sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa. Peraturan desa berlaku sejak ada ketetapan dari kepala desa.

### 2.2.3 Tinjauan Tentang Konflik

#### a. Pengertian Konflik

Menurut Alisbahjana, S.T. (2009:17), mengartikan konflik adalah perbedaan pendapat dan perbedaan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama. Sedangkan Stoner J. A. F. & Freeman (2004:17) berpendapat bahwa, konflik organisasi adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi atau kepribadian. Perbedaan pendapat dan persepsi mengenai tujuan, kepentingan maupun status serta nilai individu dalam organisasi merupakan penyebabnya munculnya konflik. Demikian halnya persoalan alokasi sumber daya yang terbatas dalam organisasi dapat menimbulkan konflik antar individu maupun antar kelompok.

Luthans, F. (2007:17) mengartikan konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara organisasi, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut, *“Conflict has been defined as the condition of objective incompatibility between values or goal, as the behavior of deliberately interfering with another’s goal achievement, and emotionally in term of hostility”*. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Walton, R. E. (2008:17). Yang menyatakan bahwa konflik organisasi adalah perbedaan idea atau inisiatif antara bawahan dengan bawahan, manajer dengan

manajer dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ( coordinated activities). Perbedaan inisiatif dan pemikiran sebagai upaya identifikasi masalah-masalah yang menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Dubrin, a.j. (2004:17) mengartikan konflik mengacu pada pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan sebagai berikut: "*Conflict in the context refers to the opposition of persons or forces that gives to some tension. it occurs when two or more parties (Individuals, groups, organization perceive mutual exclusive goals, or events*".

Pengertian yang lebih lengkap dikemukakan oleh Stoner dan Wankel (2011:18). Bahwa konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas, aktivitas-aktivitas pekerjaan, dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan nilai-nilai atau persepsi yang berbeda. Sedangkan Aldag, R. J. dan Stearns, T. M. (2007:18). Secara tegas mengartikan konflik adalah ketidaksepahaman antara dua atau lebih individu atau kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan. Dengan kata lain,

konflik timbul karena satu pihak mencoba untuk merintangi/mengganggu pihak lain dalam usahanya mencapai suatu tujuan

b. Proses Terjadinya Konflik

Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Hendricks. (2010:19). Mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari tiga tahap: pertama; peristiwa sehari-hari, kedua adanya tantangan, sedangkan yang ketiga; timbulnya pertentangan.

Peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Pada tahap kedua, apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Masing-masing anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standard an aturan organisasi. Kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan organisasi. Pertentangan merupakan proses terjadinya konflik tahap ketiga. Pada tahap ini masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Faksi-faksi kecil berkembang dan kohesivitas kelompok dianggap lebih penting daripada kesatuan organisasi.

Konflik melalui proses dan terdapat kondisi yang mendahuluinya. Hardjana, A. M. (2013:19). Menyebutkan lingkaran konflik terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi yang mendahului

Permulaan konflik (*antecedents of conflict*) merupakan kondisi-kondisi yang menyebabkan mendahului suatu peristiwa konflik. Peristiwa yang dapat mengawali konflik adalah adanya kekecewaan (*frustration*). Kekecewaan tidak selalu diungkapkan secara terbuka dan biasanya gejala-gejala akan terjadinya konflik tidak dapat dilihat. Masing-masing individu ataupun kelompok berusaha menahan diri dan tidak bersifat reaktif.

2. Kemungkinan konflik yang dilihat dan di rasa

Pada tahap berikutnya kedua belah pihak merasakan adanya konflik (*perceived conflict*). Di tempat kerja tercipta suasana persaingan tiap kelompok cenderung untuk saling mengungguli dan bahkan berusaha mengalahkan kelompok lain. Keterbatasan sumber daya organisasi; dana, peralatan, fasilitas kerja, informasi, tenaga dan waktu kerja menyebabkan individu atau kelompok saling berebut.

3. Perilaku yang Nampak

Prilaku yang Nampak (*manifest behavior*), pada situasi kerja sudah nampak peristiwa konflik. Individu ataupun kelompok menanggapi dan mengambil tindakan, bentuknya dapat secara lisan, saling mendiamkan, bertengkar, berdebat. Sedangkan tindakan nyata dalam perbuatan berupa persaingan, permusuhan atau bahkan dapat mengganggu kelompok lain sehingga mengancam kelangsungan organisasi.

#### 4. Konflik ditekan atau dikelola

Pengelolaan konflik (*conflict resolution*), pimpinan atau manajer bertanggung jawab terhadap pengelolaan conflict didalam organisasi realitas menunjukkan bahwa konflik selalu hadir pada setiap organisasi dan keberadaan konflik tidak dapat dibenarkan. Tugas pimpinan adalah mengarahkan dan mengelola konflik agar tetap produktif, meningkatkan kreativitas individu guna menjaga kelangsungan organisasi.

#### c. Jenis-Jenis Konflik

Soekanto, S. (2005:310), mengemukakan jenis-jenis konflik meliputi, yaitu:

##### 1. Konflik Antar Pribadi

Konflik antar pribadi didasari bahwa setiap individu mempunyai perbedaan dan keunikan, yang berarti tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek jasmaniah maupun rohaniannya. Timbulnya perbedaan

individu dikarenakan berbagai factor antara lain, factor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya kepribadian. Perbedaan individu dapat dijadikan kekuatan bagi organisasi karena keahlian dan keterampilan pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi sebaliknya, perbedaan yang ada dapat menghambat kinerja organisasi apabila setiap anggota terfokus pada kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan yang lebih besar yaitu tujuan organisasi.

## 2. Konflik Antar Kelompok.

Selama pertentangan (konflik) dilakukan secara jujur, maka solidaritas kelompok tidak akan goyah. Persaingan yang jujur akan menyebabkan individu-individu semakin padu (kohesif) dalam mempertahankan prestasi kelompok. Konflik termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan kelompok.

## 3. Konflik Rasial

Sumber konflik bukan hanya perbedaan kepentingan, tujuan maupun kegagalan dalam komunikasi akan tetapi perbedaan kebudayaan dan ciri-ciri badaniah dapat menjadi latar belakang timbulnya konflik. Konflik rasial merupakan salah satu jenis konflik yang lebih luas dibandingkan dengan konflik kelompok. Ras yang berjumlah mayoritas di suatu

masyarakat cenderung ingin menguasai dan merasa mempunyai hak yang lebih luas. Sedangkan ras minoritas berusaha menuntut persamaan hak dan ingin diperlakukan adil.

#### 4. Konflik Antar Kelas-Kelas Sosial

Masyarakat terdiri dari beberapa lapisan social yang hidup saling membutuhkan. Jenjang pendidikan dan tingkat kekayaan anggota masyarakat sangat bervariasi. Kelompok orang-orang kaya membantu kelompok miskin dalam bentuk santunan maupun memberikan kesempatan / peluang pekerjaan demikian halnya kelompok masyarakat yang berpendidikan menjalankan tugas sebagai pendidik masyarakat melalui lembaga yang bersifat formal (sekolah) maupun bersifat nonformal (kursus, perkumpulan atau pengajian). Konflik terjadi manakala sub-sub sistem di masyarakat tidak menjalankan fungsi secara adil dan proporsional sehingga kelompok masyarakat tertentu merasa terabaikan.

#### d. Dampak Konflik Sosial

Ada beberapa dampak konflik sosial menurut Soejonsoekanto (2007:90) sebagai berikut:

1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (*ingroup*) yang mengalami konflik dengan kelompok lain.
2. Terjadinya keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.

3. Terjadi kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, serta terhambatnya segala aktifitas sosial.
4. Lahirnya unsur dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik

e. Penyelesaian Konflik

Hendricks, (2010:61), menyamakan istilah teknik penyelesaian konflik dengan gaya (*Style*) manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik yaitu:

1. Gaya penyelesaian dengan cara mempersatukan (*integrating*)

Penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan (*integrating*) yaitu, pihak-pihak yang terlibat konflik melakukan tukar-menukar informasi. Kedua pihak ada keinginan untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan (*integrating*) mendorong munculnya kreativitas yang bersangkutan. Kelemahan gaya penyelesaian dengan cara mempersatukan membutuhkan waktu yang lama dan dapat menimbulkan kekecewaan karena penalaran dan pertimbangan rasional seringkali dikalahkan oleh komitmen emosional untuk suatu posisi.

2. Gaya penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu (*obliging*)

Strategi kerelan untuk membantu (*obliging*) berperan untuk mengurangi perbedaan antar kelompok dan mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencari persamaan-persamaan. Perhatian pada orang atau kelompok lain tinggi menyebabkan seseorang merasa puas karena keinginannya dipenuhi oleh pihak lain, walaupun salah satu pihak harus mengorbankan sesuatu yang penting bagi dirinya. Gaya semacam ini dapat di gunakan sebagai strategi yang sengaja untuk mengangkat atau menghargai orang lain, membuat pihak lain merasa lebih baik dan senang terhadap suatu isu.

3. Gaya penyelesaian konflik dengan mendominasi (*dominating*)

Tekhnik dominasi (*dominating*) merupakan kebalikan gaya obliging menekankan pada kepentingan diri sendiri. Kewajiban sering diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok dan cenderung meremehkan keputusan harus diambil secara cepat. Gaya mendominasi dapat membantu pimpinan jika pihak-pihak yang terlibat konflik kurang pengetahuan atau keahlian tentang isu yang menjadi konflik.

4. Gaya penyelesaian konflik dengan menghindari (*avoiding*)

Menghindar (*avoiding*) sebagai salah satu strategi pengendalian konflik dengan cara menghindari persoalan. Pihak yang menghindari dari konflik tidak menempatkan suatu

nilai pada diri sendiri atau orang lain. Gaya menghindar atau menghindari tanggung jawab atau mengelak dari suatu isu konflik. Seorang pimpinan yang menggunakan gaya menghindar berusaha lari dari permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya, atau meninggalkan pertarungan untuk mendapatkan hasil.

5. Gaya penyelesaian konflik dengan kompromi (*compromising*)

Gaya penyelesaian dengan cara kompromi (*compromising*) dikategorikan efektif bila isu konflik sangat konflik dan kedua pihak yang terlibat konflik mempunyai kekuatan yang berimbang. Teknik kompromi dapat menjadi pilihan bila metode lain gagal dan kedua pihak mencari jalan tengah pada kompromi masing-masing pihak rela memberikan sebagian kepentingannya (*win-win solution*).

#### 2.2.4 Tinjauan Tentang Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah " a union of families" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat (Khairuddin, 2008:4).

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009:8).

Istilah Masyarakat (Society) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial moderen yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambar kelompok manusia yang besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi (Soekanto, 2006:10).

Definisi Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian "gesellaachafi" atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi- organisasi tertentu (Soekanto, 2006:15).

Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian (Soekanto, 2006:29).

Berdasarkan pengertian menurut pendapat di atas maka dapat disimpulkan masyarakat adalah hubungan satu orang/sekelompok orang-orang yang hidup secara berkelompok maupun individu dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

#### b. Ciri –Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
  - b) Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
  - c) Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
  - d) Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan
- c. Syarat Fungsional Masyarakat Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu :
- a) Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub- sistem organismperilaku dan dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya.
  - b) Fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem.
  - c) Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub - sistem kebudayaan. Hal itu, berarti mempertahankan prinsip

- prinsip tertinggi dari masyarakat. Oleh karena itu diorientasikan pada realita yang terakhir.

d) Fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub - sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan - tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

d. Pembagian Masyarakat Cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam :

1. Masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsi ataupun pelarian dan sebagainya kedalam (kelompoknya) bersifat Gemeinschaft keluar bersifat Gesellschaft.

2. Masyarakat merdeka yang terbagi dalam :

a. Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya.

Suku golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan umumnya yang masih sederhana sekali

kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar umumnya bersifat Gemeinschaft.

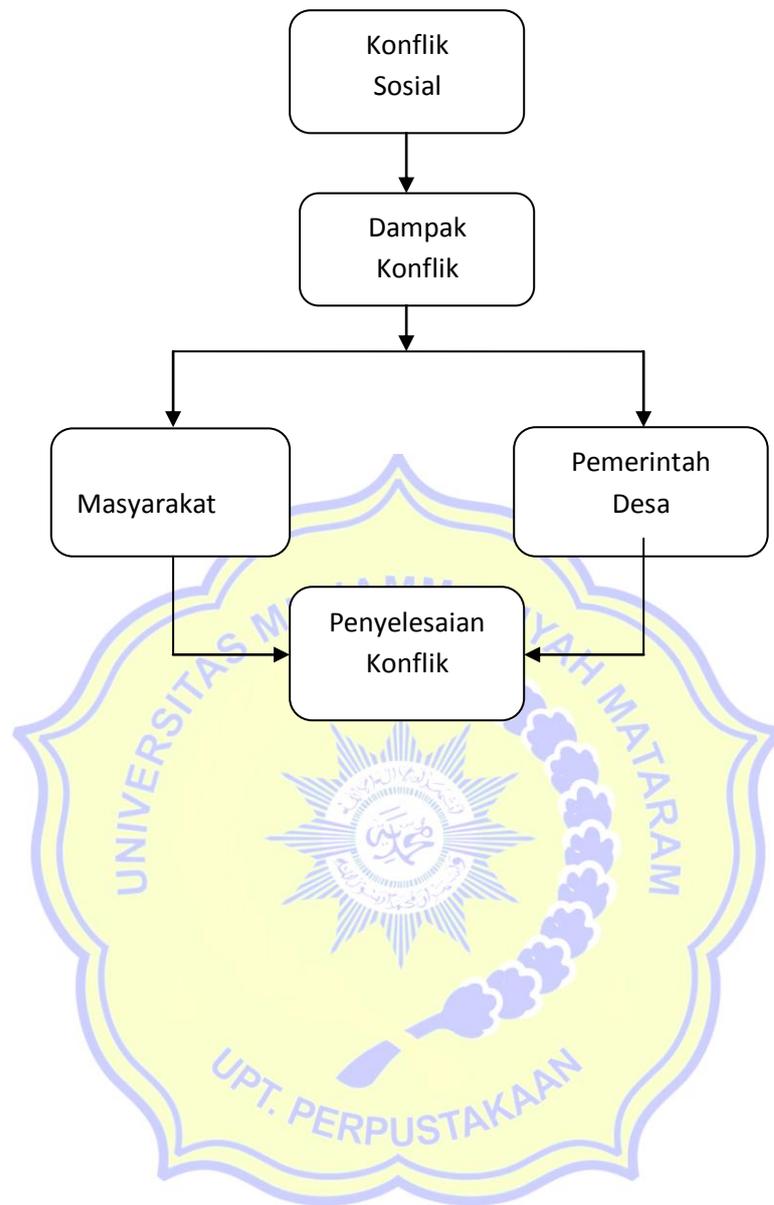
b. Masyarakat budaya terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Semua jenis penelitian pasti diperlukan kerangka pikir sebagai pijakan dalam menentukan arah penelitian, hal ini menghindari perluasan pengertian yang akan mengakibatkan penelitian menjadi tidak terfokus. Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Kehidupan masyarakat banyak terdapat perbedaan. Karena perbedaan tersebut telah memunculkan berbagai perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial sering terjadi baik antar individu, antar kelompok maupun antar pemerintah. Konflik sosial dalam kerangka pikir ini ialah menerangkan bahwa, awal mula terjadinya konflik sosial yang terjadi di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong ini disebabkan oleh suporter sepak bola yang membuat keributan diluar lapangan sehingga menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Akibat dari konflik sosial tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat yang terjadi di desa pelangan. Pemerintah beserta masyarakat di Desa Pelangan harus turun tangan dalam menyelesaikan konflik secara bersama, dalam hal ini pemerintah beserta masyarakat menggelar rapat yang telah disepakati dan membahas masalah konflik sosial yang sudah berdampak bagi masyarakat di Desa Pelangan harus cepat diselesaikan, sehingga masyarakat kembali normal dalam melakukan kegiatan yang berkepentingan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (2011:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang tepat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak oleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.

Kirk dan Miller (2009:8) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena proses strategi Pemerintah desa dalam penyelesaian konflik sosial antar masyarakat di desa Pelangan kecamatan

Sekotong kabupaten Lombok barat. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna.

### **3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor desa Pelangan. Alasan dipilihnya kantor desa ini adalah karena kantor desa merupakan lembaga pemerintah yang terpusat secara khusus pada desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang ada pada desa pelangan kecamatan sekotong.

### **3.3 Informan**

Kreuger (2006:227) menyarankan agar maksudnya adalah untuk memperoleh informasi (informan) dari alam kualitatif dari sekelompok orang terbatas jumlahnya.

Menurut Morgan (2009:229) faktor penentu jumlah kelompok adalah jumlah sub-sub kelompok yang di perlukan. Seterusnya di kemukakannya bahwa satu kelompok tidak pernah mencukupi apabila anda mengamati dinamika kelompoknya.

Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Aparatur Desa sebanyak 6 orang yang pernah ikut dalam penyelesaian konflik sosial di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
2. Masyarakat yang berusia antara 18-40 tahun dan tidak pikun sehingga mampu memberikan informasi data yang representative, yaitu:
  - a. Orang tua sebanyak 12 orang

- b. Tokoh pemuda sebanyak 4 orang
3. Tidak cacat atau tunawicara dan dapat diajak berkomunikasi;
4. Bersedia menjadi informan.

### **3.4 Jenis dan sumber data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif kualitatif dan bukan data kuantitatif. Lincoln dan Guba (2005:30) mengulas tentang ciri penelitian deskriptif kualitatif yaitu hasil pengkajian data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang di kumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Menurut Lofland (2004:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap Aparatur Desa, dan tokoh

masyarakat yang ada di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

- b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari internet, buku-buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan.

### **3.5 Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Moleong (2007:238) pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam budaya yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Observasi

Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. (Guba dan Lincoln, 2005:174)

2. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terbuka. Menurut (Moleong, 2007:189) dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka yang para subjeknya

tahu bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu.

### 3. Dokumentasi

Menurut Moleong (2007:219) dokumen resmi terdiri atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang di gunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan semacamnya. Dokumen demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan.

Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang di hasilkan oleh suatu lembaga social, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang di siarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat di manfaatkan untuk menelaah konteks social, kepemimpinan, dan lain-lain.

### 3.6 Teknik Analisis Data

*Analisis Data Kualitatif* menurut (Bogdan & Biklen, 2008:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, menstintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.

### 3.7 Keabsahan Data

Menurut Denzim (2009:330) dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang >(Strategi Pemerintah Desa dalam penyelesaian konflik sosial antar masyarakat di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat) maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada anggota keluarga, tetangga dan remaja (informan) dari ketiga sumber data tersebut akan di deskripsikan dalam katagori manakah pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang lebih spesifik dari ketiga sumber datatersebut.
2. Triangulasi Teknik, yaitu triangulasi untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu tehkin wawancara , dokumen, dan obsevasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.
3. Triangulasi Metode, yaitu Menurut Patton (2003:329), terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Jadi *triangulasi* Menurut Moleong (2007:332) berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

